

Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN

Herdi Sahrasad

Peneliti Senior Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, dan Dosen Ilmu Sosial-Politik Universitas Paramadina, Jakarta

Abstract: *Conflict in the South China Sea have significant risk. China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, and the Philippines have competing territorial and jurisdictional claims, particularly over rights to exploit the region's possibly extensive reserves of oil and gas. Freedom of navigation in the region is also a contentious issue, especially between the United States and China over the right of U.S. military vessels to operate in China's two- hundred-mile exclusive economic zone (EEZ). These tensions are shaping—and being shaped by—rising apprehensions about the growth of China's military power and its regional intentions. China has embarked on a substantial modernization of its maritime paramilitary forces as well as naval capabilities to enforce its sovereignty and jurisdiction claims by force if necessary. At the same time, it is developing capabilities that would put U.S. forces in the region at risk in a conflict, thus potentially denying access to the U.S. Navy in the western Pacific. Given the growing importance of the U.S.-China relationship, and the Asia- Pacific region more generally, to the global economy, the United States has a major interest in preventing any one of the various disputes in the South China Sea from escalating militarily.*

Kata Kunci: *Laut China Selatan; Amerika Serikat; ASEAN*

Pendahuluan

Gugus Kepulauan Spratly sejak beberapa dekade menjadi kawasan sengketa yang diperebutkan oleh China, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Enam negara ini mengklaim bahwa sebagian atau seluruh kepulauan itu adalah hak teritorial mereka. China paling agresif mengklaim Kepulauan Spratly dan pada tahun 2014 membangun dua pulau buatan untuk mengukuhkan klaimnya di Laut China Selatan (LCS). Salah satu pulau buatan bahkan dijadikan pangkalan militer.

Kawasan LCS telah menjadi ajang konflik kepentingan dan pamer kekuatan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. China, dan ASEAN/AS, misalnya, terus saling tekan-menekan dan desak-mendesak, meminjam perspektif Realisme dari Morgenthau, untuk saling bersaing secara kekuatan dan kekuasaan, seakan menegaskan secara terbuka bahwa negara yang kuat akan selalu dapat mengalahkan dan bertahan lebih lama dibandingkan dengan negara yang lemah. Para pemimpin China dan ASEAN/AS sangat menyadari bahwa negara adalah aktor utama dan keamanan merupakan kepentingan utamanya, sedangkan kekuatan yang paling bisa diandalkan adalah kekuatan militer dan ekonomi di era globalisasi ini. Kepentingan utama sebuah negara merupakan pertahanan diri. Oleh karena itu, negara harus mencari kekuasaan/kekuatan (power) dan harus selalu melindungi diri.¹

¹ Realisme memandang politik internasional bersifat kompetitif, konflikual dan anarki. Negara-negara bersaing dan berkonflik untuk survive. Teori Realisme menganggap negara berdaulat sebagai aktor utama dalam politik internasional. Para realis memandang negara sebagai unitary dan rasional. Realis menganggap bahwa negara merupakan kesatuan dan selalu bertindak secara rasional serta prudence atau berhati-hati dalam bertindak. Aspek terpentingnya adalah,

Laksamana Wu Shengli dari China mengatakan kepada kepala operasi AL AS, Laksamana John Richardson, bahwa sebuah insiden kecil bisa memicu perang di LCS. Dalam teleconference, Kamis (29/10/2015), Wu Shengli menyatakan, "Jika AS terus melakukan tindakan provokatif, situasi bisa jadi serius antara kedua belah pihak di laut dan di udara, bahkan memicu perang." Kemenlu di Beijing juga langsung memanggil Duta Besar AS untuk China Max Baucus guna meminta penjelasan. Akibat peristiwa patroli kapal perang AS di kawasan Kepulauan Spratly itu, hubungan antara China dan AS sempat menegang. China mengklaim, kapal perangnya terus mengikuti USS Lassen dan memberi peringatan karena dinilai melanggar wilayah teritorialnya. Parapetinggi militer di Beijing mengatakan, merekatelah menyiapkan armada kapal perangnya untuk menghadapi terulangnya provokasi AS semacam itu.²

Kepulauan Spratly adalah sebuah gugusan pulau yang terletak di laut China Selatan. Kepulauan Spratly dengan luas 244.700 km persegi diperkirakan terdiri dari 320 pulau. Disamping itu Kepulauan ini di sinyalir mengandung simpanan minyak dan gas (migas) terbesar keempat di dunia, diperkirakan mencapai 17.7 bilion ton migas. Selain itu, kepulauan Spratly merupakan tempat yang strategis dari segi pertahanan dan militer. Bagi China, klaim teritorial atas kepulauan di LCS lebih banyak berkaitan dengan kepentingan ekonominya. Sekitar 30 persen lalu lintas kapal melewati LCS mengangkut produk ekspor China serta minyak dari Timur Tengah yang vital bagi ekonomi China.

"Sekitar 30 persen lalu lintas kapal melewati Laut China Selatan mengangkut produk ekspor China serta minyak dari Timur Tengah yang vital bagi ekonomi China," kata Vincent Wei-Cheng Wang, pakar politik luar negeri China di University of Richmond.

Meluasnya ketegangan di LCS dekade ini dimulai ketika Vietnam dan Malaysia mengajukan perluasan klaim wilayah landas kontinen mereka ke sebuah area di LCS sejauh 200 mil laut (370,4 kilometer) dari garis pantai. China secara tegas menyatakan keberatan atas klaim Vietnam dan Malaysia, dengan menegaskan kedaulatannya atas pulau-pulau di LCS dan perairan sekitarnya tak bisa diganggu gugat.³

Beijing bersikeras memiliki hak berdaulat untuk hampir seluruh wilayah LCS, bahkan hingga perairan yang dekat dengan pantai negara-negara lain. Menurut gambar dari satelit, China telah mereklamasi jutaan meter persegi tanah di Kepulauan Spratly guna membangun berbagai fasilitas militer, termasuk tiga landasan pacu. Ketegangan China dan AS meningkat sejak China mengubah daerah konservasi terumbu tersebut -- yang diklaim sejumlah negara -- menjadi pulau-

bagaimana suatu negara yang dianggap sebagai aktor paling penting bagi para realis, mempertahankan keberadaannya (survive). Karena, negara akan melakukan apa saja dan akan mempertahankan mati-matian demi mendapatkan rasa aman bagi negara itu sendiri. Negara juga tidak memikirkan keadaan negara lain dan hanya mementingkan kepentingan negara itu sendiri. Kondisi ini dinamakan *struggle of power*. Lihat, Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations* (New York: Knopf, 1948), terj. Politik Antar Bangsa (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010); R. Jackson & G. Sorensen, *Introduction to International Relations* (Oxford: OxfordUniversity Press, 1999); Andre H. Pareira, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999); dan, John Baylis & Smith Steve (eds), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition (OxfordUniversity Press, 2001).

²"AS Perlu Pertahankan Relasi," Kompas, 29 Oktober 2015. baca juga, "RRC versus AS: Kasus Spartley di Laut China Selatan Bakal Seru," <http://konfrontasi.com/>

³Baca, Robert Beckman, *Issues in Human Security in East Asia* (Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies and Institute of Southeast Asian Studies, 2011); Sang Soo-Lee, "A New Options for Development of Human Security in East Asia: Reforming the ASEAN Regional Forum," *The Journal of Peace Studies*, h.151-152.

pulau kecil untuk mendukung fasilitas militer. Langkah ini dianggap AS sebagai ancaman bagi kebebasan navigasi.

AS di bawah Presiden Barack Obama ambil bagian dan terlibat kembali secara aktif untuk mengimbangi kekuatan China di kawasan Asia.⁴ Washington berulang kali mengatakan tidak mengakui klaim China atas LCS. AS pun menempatkan kapal perangnya di kawasan sengketa yang dipandang oleh China sebagai potensi ancaman bagi keamanan nasional China secara umum.

Sebaliknya, Filipina yang memiliki pakta pertahanan bersama dengan AS justeru memandang manuver militer AS itu sebagai penyeimbang kekuatan China di kawasan LCS. Vietnam, yang juga mulai menjalin hubungan militer dengan AS, mengharapkan campur tangan AS dalam sengketa ini dapat memperkuat posisi tawar mereka terhadap China.

Vietnam dan Filipina telah menuduh Angkatan Laut China mengganggu kerja- kerja eksplorasi di dalam perairan yang diklaim Vietnam dan Filipina sebagai milik mereka. Namun China menuding kedua negara tersebut telah menuding kawasan miliknya. China bahkan pernah mengusir para nelayan Filipina yang dianggap telah memasuki perairan miliknya di Kepulauan Spratly. Atas tindakan China tersebut, Filipina pun mengirim kapal patrolinya untuk menjaga kawasan perairan tersebut. Sedangkan Vietnam sendiri telah membalas provokasi China dengan mengadakan latihan perang di wilayah yang diklaim Vietnam di perairan Kepulauan Spratly. Dalam menghadapi kemelut di kepulauan Spratly ini, seharusnya ASEAN harus pro aktif dan jangan sampai ada kuasa baru yang mengambil kesempatan dalam ketegangan ini. Seharusnya pihak-pihak yang terlibat menghormati deklarasi yang ditanda tangani di Phnom Penh pada 4 November 2002.

Dalam deklarasi tersebut, China dan 10 menteri luar negeri ASEAN telah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini tanpa menggunakan kekuatan militer, tetapi melalui dialog secara langsung dengan negara-negara terlibat. Kendati demikian, China tetap menunjukkan peningkatan militernya dan provokasi yang keterlaluan di perairan LCS.

Dalam hal ini, Filipina sangat prihatin melihat peningkatan militerisasi China di LCS. Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina, Albert Del Rosario menyatakan, kehadiran kapal perang dan paramiliter China secara masif di dua gugusan karang di LCS—Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal—menimbulkan prasangka mengkhawatirkan. Bagi Filipina, gugusan karang itu termasuk zona ekonomi eksklusifnya sesuai dengan hukum laut internasional. Filipina telah mengajukan perkara ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional untuk mencari penyelesaian di jalur hukum internasional. Sebaliknya, China berdasarkan alasan sejarah merasa memilikinya sejak kejayaan Dinasti Han. Kehadiran kapal perang China ini, menurut Del Rosario, merupakan ancaman pada usaha memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan. Manuver Filipina ini menunjukkan bahwa masalah LCS menjadi fokus bahasan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ASEAN dan Forum Regional ASEAN (ARF) di Brunei.⁵

Menanggapi aksi Filipina yang asertif terkait LCS, Harian Rakyat yang selalu mencerminkan pandangan Partai Komunis China telah mengeluarkan sikap keras dalam editorial 23 Juni 2013, di mana Beijing menuduh Filipina ingin memakai ASEAN untuk melanggar kedaulatannya di LCS dan memberi peringatan akan kemungkinan tindakan

⁴ Richard L. Armitage, "The US and Asia: A Sort of Homecoming"... h. 15.

⁵ Makarim Wibisono, "Laut China Selatan dan Tantangan ASEAN," Kompas, opini, Kamis, 11 Juli 2013. Para menteri luar negeri ASEAN akhir Juni 2013 bertemu di Bandar

balasan. Media tersebut menyatakan, Filipina telah menyeret-nyeret AS sebagai patronnya dan menunggangi ASEAN untuk mencapai maksudnya. Memang sebelumnya sebuah kapal pemusnah Angkatan Laut AS ikut bergabung dengan kapal perang AL Filipina dalam latihan perang di perairan dekat Scarborough Shoal.⁶

Para analis melihat, dalam konteks China-Filipina terkait persoalan LCS bermula ketika China merasa dipojokkan dengan manuver Filipina yang hendak membawa ASEAN untuk berhadapan dengannya. Manuver Filipina ini, diduga dilakukan untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan China.

China juga menyatakan ketidaksukaannya dengan keterlibatan AS sebagai sekutu Manila dalam masalah LCS. Meski mengakui tidak memiliki klaim atas wilayah LCS, bagi AS keterlibatannya di kawasan itu untuk memastikan jalur laut bagi pelayaran internasional tetap aman.

Langkah-langkah agresif China dengan berbagai respon yang keras justru memperbesar kecenderungan ke arah pelibatan kekuatan-kekuatan ekstra- regional untuk mengimbangnya. ASEAN telah bersepakat memperluas East Asia Summit dengan memasukkan AS dan Rusia sebagai anggota tetap.

Dalam hal ini, kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia dan beberapa negara ASEAN pada bulan November 2010 dan kehadirannya dalam KTT ASEAN di Bali November tahun 2011 menandai fase re-engagement Seri Begawan, Brunei, menghadiri serangkaian Konferensi Tingkat Menteri ASEAN dengan mitra dialognya, termasuk Forum Regional ASEAN. Menlu Filipina Albert del Rosario pada hari pertama di ibu kota Brunei itu mengeluarkan pernyataan terkait keprihatinana Manila atas langkah RRC di kawasan Kep. Spratley itu. (keterlibatan kembali) AS dalam percaturan regional di Asia Tenggara. AS juga ingin memastikan China tidak melakukan intimidasi atau ancaman penggunaan kekerasan (use of force) untuk penyelesaian klaim dengan negara-negara yang kekuatan militernya tidak sebanding.

Sinyal China Awal 2015

Pada tahun 2015, China mengirim alat pengeboran minyaknya ke Kepulauan Paracel dan mengerjakan berbagai konstruksi yang terus berlangsung di Kepulauan Spratly. Tindakan China telah memancing potensi konflik di kawasan yang kian terbuka.

Sebelumnya, tahun 2014, China menunjukkan secara jelas bahwa negara ini bertekad menegaskan kedaulatannya pada lebih dari 90 persen kawasan LCS, sebagaimana ditentukan oleh garis 10-DASH secara unilateral.

Di bulan April 2014, Perdana Menteri China Li Keqiang menegaskan kepada Forum Boao untuk Asia yang diselenggarakan oleh China di Pulau Hainan, bahwa Beijing akan menanggapi secara tegas terhadap provokasi yang menghalangi perdamaian serta stabilitas

⁶ Sikap keras China menyangkut integritas wilayahnya berkaitan erat dengan budaya politiknya sejak lama. Mereka menganggap bahwa China mengalami masa penderitaan dan penghinaan yang berkepanjangan sejak Dinasti Qing oleh kekuasaan negara-negara Barat dan Jepang. Wilayahnya hilang satu per satu karena kekuatan kolonialisme dan imperialisme di masa lalu. Karena itu, sikap tegas China mengenai keutuhan wilayahnya merupakan wujud usahanya mengembalikan kebanggaan dan kejayaan Tiongkok. Siapa pun yang berkuasa di Beijing selalu memperhitungkan budaya politik ini, termasuk presiden baru Xi Jinping. Ini terlihat jelas dalam posisi China mengenai sengketa Laut China Timur, Laut China Selatan, dan Tibet. Malahan di Alun-alun Tian An Men telah dibangun monumen baru menggunakan teknologi canggih mempertontonkan kemajuan Tibet di bawah China.

di LCS.

Pada bulan Mei 2014, China menambatkan alat pengeboran minyak dalam laut, Hai Yang Shi 981 [HYSY981] ukuran raksasa ke lokasi dekat Kepulauan Paracel atau Xisha di LCS. Hal ini menggarisbawahi klaimnya atas kedaulatan di daerah ini. Kontan saja hal ini mengundang kemarahan besar dari Vietnam, yang juga memiliki klaim yang berbenturan. Hal itu juga menunjukkan komitmen yang tidak seimbang atas kondisi status quo – atau ketiadaannya – oleh sebagian atau seluruh pihak yang bersengketa di kawasan LCS itu.

Tidak adanya ketertiban normatif di LCS membuka jalan untuk perseteruan resmi di lapangan maupun di arena akademis pada tahun 2015. Hanoi menilai, tanpa garis dasar kesepakatan, negosiasi apa pun, bakal berada pada landasan yang rapuh. ASEAN dan China memang telah melakukan serangkaian perundingan sejak kesimpulan Deklarasi Perilaku [Declaration of Conduct] 2002, tetapi prospek negosiasi ini masih muram.⁷

Dampaknya, tahun 2014 merupakan tahun yang membangkitkan kesadaran Jepang, Filipina dan Vietnam, bahwa mereka harus menghadapi pergerakan China untuk menguasai kendali secara hukum dan strategis sepenuhnya atas LCS. Akibatnya, ketegangan semakin tinggi.

Pada bulan Agustus 2014, pesawat pemburu Angkatan Laut China terbang di atas kapal Angkatan Laut A.S., P-8 Poseidon, nyaris menabraknya.

Dua bulan sebelumnya (Juni 2014), kapal laut bersenjata milik China memburu dan menenggelamkan perahu nelayan milik Vietnam. China juga berselisih dengan Jepang dan Filipina, dan berdasarkan kesepakatan Washington-Tokyo, maka AS wajib untuk membela.

Akibat selanjutnya, karena khawatir atas gangguan China ke wilayah maritim yang diklaim oleh Hanoi, Vietnam meninggalkan tradisi pengucilan yang menjadi kebanggaannya. Negara ini semakin dekat ke Filipina, Jepang dan India, serta mencari hubungan baru dengan AS. Ini jelas sinyal kuat bagi persaingan kuasa dan kekuatan di kawasan LCS.

Harus diingat bahwa, keberhasilan ekonomi bangsa-bangsa Asia di timur laut, yang berhadapan dengan kurangnya struktur swa-regulasi yang efektif untuk menjaga keamanan, telah menciptakan dinamika yang berbahaya, yang mudah meledak dan tidak stabil di kawasan ini.

Dewasa ini, orang-orang yang membicarakan soal kawasan Indo-Pasifik – busur Asia dari Jepang melalui China sampai ke Pakistan – selalu memulainya dengan mencermati, bahwa kawasan ini sudah menjadi pusat gravitasi ekonomi dunia. Itu memang betul. Ekonomi di kawasan ini sekarang kembali mencapai separuhnya dari perekonomian AS atau Eropa.

“Dari segi daya belinya, kawasan ini memiliki daya beli dua kali lebih besar. Wilayah ini mencakup hampir separuh manufaktur di dunia. Mereka semakin cepat tumbuh dibandingkan tempat-tempat lainnya,” kata Charles W. Freeman Jr, ketua bersama Yayasan Kebijakan AS-China dan pakar A.S terkemuka mengenai masalah Asia Timur.⁸

Betapapun, nampak bahwa kawasan Asia-Pasifik sudah menjadi terlalu besar dan dinamis untuk diatur oleh kekuatan di luar kawasan. Namun sayangnya, kawasan ini tidak efektif mengatur dirinya sendiri.

“Status quo ini tidak boleh berkelanjutan. Tatkala keseimbangan kekuatan di kawasan ini berkembang, risiko perang akibat kelengahan meningkat,” kata Charles W. Freeman Jr. Artinya,

⁸ “Laut China Selatan: Masalah Lama untuk Solusi Baru,” <http://m.inilah.com/news/detail/2169710/laut-china-selatan-masalah-lama-untuk-solusi-baru>.

kehadiran militer China di LCS akan mengundang langkah serupa dari Vietnam, Filipina dan tetangga ASEAN lainnya. Semua itu jelas persoalan lama yang menunggu solusi baru.

Laut China Selatan dan Rivalitas China-AS

Bagi AS diplomasi ekonomi-politik China telah meningkat menjadi sangat tidak terlihat dan cerdik. Di saat China mempertahankan klaimnya atas pulau Spratly dan Paracel yang melingkar di Laut China Selatan, dan menolak pembicaraan multilateral, justru malah melakukan negosiasi ke masing-masing negara yang terlibat konflik tersebut.

Adanya persaingan eksistensi antara AS dan China di kawasan ini, secara tidak langsung membawa Asia Tenggara ke dalam strategi politik AS. Ada dua ancaman militer China terhadap Asia Tenggara yang secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi AS dalam strateginya terhadap China.

Pertama, ada kekhawatiran dan kecemasan atas hegemoni China yang agresif di Asia Tenggara mengancam kebebasan pelayaran di LCS, sehingga membuat AS, Jepang, bahkan negara-negara Asia Tenggara masuk dalam politik China tersebut.

AS dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan mencari dukungan dari negara-negara ASEAN untuk menjaga keamanan jalur laut atau justru sebaliknya, ada kemungkinan negara-negara ASEAN sendiri yang akan meminta bantuan Angkatan Laut AS.

Jika demikian maka AS dapat membawa serta Angkatan Udaranya dengan dalih untuk melindungi pasukan AL-nya, serta mengamankan fasilitas teritori ASEAN dari serangan militer China.

Kedua adalah bahwa China dapat saja mencoba membangun dan mempertahankan kontrol fisik atas hampir keseluruhan kepulauan Spratly, yang diklaim sebagai wilayahnya. Ketidakpastian di perairan LCS ini tentu saja menciptakan ketegangan keamanan.

Dalam kondisi tertekan seperti ini akan mendorong negara-negara ASEAN untuk mencari dukungan dari kekuatan yang dapat mengimbangi China. Sehingga sangat mungkin bagi ASEAN untuk meminta kehadiran militer AS.

Pada akhirnya, kepentingan-kepentingan AS di Asia Tenggara akan terus meningkat. AS juga tidak punya pilihan lain, karena jalur Asia Tenggara akan menjadi prioritas kelancaran perekonomiannya dan kawasan kunci pergerakan militer AS.

Secara politis Asia Tenggara akan memberikan pengaruh yang besar dalam negara-negara kawasan ini terhadap kampanye AS tersebut yang tentunya memiliki arti yang sangat penting bagi AS. Pada akhirnya ada alasan Gedung Putih berupa keharusan bagi Obama untuk menghadirkan militernya di kawasan ini dalam konteks pengamanan terhadap kepentingan tersebut.

Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah, apakah “kebangkitan China” memang sebagai ancaman bagi Asia dan berpotensi menyebabkan terjadinya destabilisasi kawasan, yang menikmati stabilitas keamanan dan perdamaian selama kurun 30 tahun terakhir ini?

Pertanyaan ini memiliki konsekuensi panjang, setidaknya dalam dua hal. Pertama, kawasan Asia—dengan peradaban panjang, kemampuan menunjukkan kepiawaian membangun kekuatan ekonomi, dan memiliki ketahanan menghadapi rentannya sistem ekonomi globalisasi yang terguncang oleh krisis keuangan AS dan krisis euro—akan terseret dalam kancah geopolitik ala Perang Dingin melalui perlombaan senjata negara-negara Asia.¹⁰

Kedua, politik poros AS sebagai pertimbangan ulang mempertahankan kepentingan intinya

di Asia tidak mampu mencapai momentum dan dukungan memadai (khususnya dari ASEAN). AS mulai menjalankan strategi merentankan kohesi kerja sama Asia di berbagai bidang akibat merosotnya kemampuan geopolitik AS mengimbangi politik global Rusia atas Suriah dan Crimea, dan berpotensi menjadi preseden di Asia melalui “kebangkitan China atau China”.

Ini tidak hanya terwujud dalam perlombaan senjata yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, tetapi juga dalam bentuk nyata berbagai perjanjian kerja sama penempatan pasukan Marinir AS (seperti di Darwin, Australia), atau penyediaan fasilitas militer dengan Filipina memperluas cakupan “wilayah perang” AS di sisi timur Asia.

Melalui sisi ancaman militer, seolah-olah potensi konflik akan terjadi pada perebutan klaim tumpang tindih kedaulatan di Laut Timur dan Laut Selatan, dari Kepulauan Diaoyu (Senkaku) ke Kepulauan Spratly dan Paracel. Di sisi ekonomi, para perancang strategi Jepang, di tengah upaya keluar dari sifat pasifis, kehilangan kepercayaan kohesi dan ketahanan ekonomi Asia, seperti tecermin dalam mekanisme ASEAN+3 (China, Jepang, dan Korea Selatan).

Harus dipahami bahwa perlombaan senjata di negara-negara Asia dipicu oleh AS sendiri melalui “kebijakan pivot” sebagai pengejawantahan strategi global AS yang hanya mengenal kebijakan “memperkuat aliansi”. Ini yang mendorong Jepang di era PM Sintaro Abe membuka interpretasi ulang konstitusi pasifis Jepang agar bisa memainkan peran “pertahanan kolektif”. Hal ini juga yang mendorong Presiden Filipina Benigno Aquino III mengikat perjanjian kerja sama pertahanan “on-demand access” ke bekas pangkalan angkatan laut Subic dan pangkalan udara Clark untuk memperoleh perangkat militer AS. Hal ini dengan mengabaikan kemungkinan perlunya bekas kedua pangkalan itu diawaki militer AS.¹²

Pertarungan Soft Power China vs AS

Persaingan negara-negara adidaya di Asia dengan menggunakan soft power oleh China versus AS, makin kencang. China dengan kekuatan ekonominya siap menghegemoni Asia.

Pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang diprakarsai China merupakan salah satu langkah bagi China untuk meningkatkan soft- power di Asia . Langkah ini penting, mengingat hadirnya kebijakan Asia’s Pivot yang dicetuskan Presiden AS Barack Obama dapat mengancam eksistensi China di Asia. Pembentukan AIIB dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi China untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia, ketika Jepang selaku salah satu pemeran utama di Asia, kian memudar. Sebagai stakeholder terbesar di Bank Pembangunan Asia, kehadiran AIIB cenderung memudahkan pengaruh Jepang, sekutu AS di Asia. Negara-negara sekutu AS di Asia sejauh ini tidak tinggal diam. Keberatan dari beberapa negara sekutu AS seperti: Korea Selatan dan Australia memberikan kesan penolakan bagi kehadiran AIIB versi China di Asia. Dengan demikian, pembentukan AIIB menjadi isu signifikan bagi perebutan pengaruh melalui soft power antarnegara superpower, khususnya di Asia.

AIIB bukan merupakan satu-satunya langkah China untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia. Chiang Mai Initiative merupakan salah satu bentuk inisiatif China dalam menyediakan dana pinjaman bagi negara-negara di Asia dengan peraturan-peraturan yang lebih longgar, ketika reaksi antipasti mulai muncul di kalangan negara-negara Asia Tenggara terhadap pinjaman dari Barat, IMF. Hal ini penting, demi menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Dengan gebrakan ini, kepercayaan diri China dapat semakin meningkatkan pesonanya di dunia, ketika negara-negara Barat semakin khawatir dengan usaha pendominasian China yang terjadi.

Selain AS, Jepang yang ingin meraih simpati negara-negara di Asia pada Perang Dunia II,

melihat pembentukan AIIB menjadi langkah propaganda China untuk mengurangi dominasi ekonominya di Asia Tenggara. Tokyo melihat selain kekuatan militer, China juga bergerak melalui bantuan ekonomi sebagai langkah dominasi di Asia melalui kerjasama perdagangan bebas, seperti: ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economy Partnership (RCEP). Hal ini memberikan pengaruh tersendiri bagi China, ketika konflik atau ketegangan regional di LCS belum terselesaikan secara damai. Langkah-langkah yang diambil China tersebut akan menjadi sinyal bagi sekutu AS di Asia atas dominasi China di Asia. Meskipun langkah China tidak menonjol secara ideologis, AS patut untuk memperhitungkan langkah China dalam upaya memperebutkan pengaruhnya di Asia.

AIIB telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Presiden China, Xi Jinping. Sejauh ini, AS gagal untuk memblokir rencana negara-negara ekonomi maju untuk bergabung dengan AIIB. Meski demikian, "perimbangan kekuatan"(balance of power) bisa dilakukan oleh negara-negara lain yang hadir dalam AIIB. Dan Beijing harus mempersiapkan diri untuk membagi peran kelembagaannya dengan anggota lain di AIIB.

Bila semakin banyak negara maju yang masuk ke AIIB, maka semakin cair pula pengaruh China di dalamnya. China awalnya menyertakan 49 persen dari total modal, membuat dominasinya tak terbantahkan. Tapi, semakin banyak negara ekonomi maju yang bergabung, maka saham modal China akan menurun atau berkurang secara signifikan. Hal ini membuka tantangan keseimbangan kelembagaan atau institutional balancing bagi China.

Pada 24 Oktober 2014, sebanyak 21 negara Asia menandatangani nota kesepahaman pendirian AIIB yang berpusat di Beijing. Bank yang dipimpin China ini akan membantu pembangunan infrastruktur negara-negara anggota, seperti pelabuhan, jalan, rel kereta api, dan proyek infrastruktur lainnya di Asia. Negara lain di luar Asia yang sudah menyatakan akan bergabung adalah Austria, Brasil, Denmark, Mesir, Finlandia, Perancis, Jerman, Islandia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.

Akademisi Ilmu Politik University of Copenhagen, Prof. Kai He menilai keseimbangan kelembagaan mengacu pada strategi diplomatik yang memungkinkan negara yang awalnya berkuasa membagi pengaruhnya pada negara anggota lain.

Ada dua jenis keseimbangan kelembagaan, yaitu secara eksklusif dan inklusif. Keseimbangan eksklusif menggunakan lembaga bersama untuk menekan negara sasaran, sedangkan keseimbangan inklusif menggunakan aturan dan norma kelembagaan yang membentuk perilakunya.

Bagaimanapun AIIB ini bisa dilihat sebagai strategi kelembagaan eksklusif China dalam melawan AS. Kendati demikian Washington tak perlu cemas bahwa keberhasilan AIIB adalah akhir dari kepemimpinan AS di dunia global. China hanya ingin memakai AIIB untuk 'mencuri' dominansi AS dalam sistem keuangan global. Namun China tetap akan menghadapi tantangan kelembagaan inklusif dari negara-negara Barat seperti Inggris, Jerman, Perancis dan Australia yang kesemuanya sekutu AS.

Dengan demikian, China tidak akan menjadi satu-satunya yang menetapkan aturan dan norma di AIIB untuk memastikan lembaga baru ini beroperasi secara transparan.

Di sisi lain, AS juga membentuk Trans-Pacific Partnership (TPP) guna mengimbangi AIIB bentukan China. Hal itu membawa dampak bagi regionalisme di Asia, khususnya bagi ASEAN. Di sisi regional, kehadiran AIIB akan menyebabkan kesatuan ASEAN kembali teruji, ketika negara-negara yang bernaung dalam organisasi regional tersebut sempat terlihat ragu dan

terpecah-pecah, antara memilih ke AIIB, atau TPP, atau keduanya menyusul langkah AS yang mengusulkan TPP. Kehadiran TPP dan RCEP jelas memiliki potensi untuk mengganggu netralitas ASEAN, di tengah konstelasi politik global yang kian tak pasti.

Bagi Indonesia, di satu sisi, tawaran bantuan finansial AIIB sebesar US\$50 Miliar dapat membantu percepatan pembangunan Indonesia, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, AS yang cemburu dan sewot karena pengaruhnya tergerus di Asia, harus mendorong Indonesia untuk mampu menempatkan diri secara tepat dan proposional di antara China dan AS, serta memanfaatkan peluang potensi kerjasama yang ada, dengan catatan tetap menjaga hubungan dengan AS/Barat agar dukungan negara-negara Barat kepada Indonesia tidak memudar atau hilang. Ini persoalan dan tantangan yang tidak mudah.

Sikap Indonesia atas Konflik LCS

Masalah Laut China Selatan nyaris selalu mengemuka di setiap Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, termasuk KTT ASEAN ke-19 di Bali 17-19 November 2011 pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004-2014. Berbagai langkah Indonesia terkait isu LCS dianggap tepat sasaran dan bisa membawa ASEAN menempatkan diri dalam konflik China- AS.

Stabilitas ASEAN tidak terlepas dari berbagai dinamika di kawasan. Di bidang politik/keamanan, merujuk perspektif Carlyle A Thayer, ada tiga faktor yang memengaruhi dinamika politik/keamanan regional di kawasan Asia Timur saat ini.¹³

Pertama, bertambahnya ketegangan dalam hubungan China-AS. Kedua, meningkatnya kembali keterlibatan AS di Asia Timur. Ketiga, peningkatan agresifitas China di LCS. Ketiga faktor ini merupakan ujian yang serius bagi ASEAN, yang telah memproklamasikan diri sebagai kekuatan pendorong utama (primary driving force) dalam penyelesaian isu-isu regional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Presiden SBY menegaskan, ASEAN dimana Indonesia menjadi kekuatan populasi terbesar, perlu secara tepat melihat konflik LCS yang berpotensi mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Perlu langkah tegas untuk bersikap bahwa ASEAN tidak akan membiarkan Asia Tenggara sebagai arena bersaing negara-negara besar.

Kebijakan luar negeri SBY ini cukup konstruktif, bahwa Indonesia sebagai kekuatan jangkar stabilitas di ASEAN telah memastikan agar dua kekuatan besar, China dan AS, tidak dalam posisi berhadap-hadapan dan menjadikan LCS sebagai ladang konflik bersenjata mereka.

Indonesia menjadi jangkar stabilitas di Asia Tenggara yang menyatukan dan menjaga soliditas ASEAN dalam mengatasi rivalitas China-AS yang bersaing secara geopolitik-geostrategi dan perebutan sumber daya alam di kawasan LCS.

Kemudian pasca kepemimpinan SBY, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lawatannya ke Jepang mengungkapkan tentang konsep sembilan garis putus-putus yang diterapkan China di kawasan LCS. Apa makna pernyataan tersebut?

Secara politik, penegasan Jokowi itu menjadi parameter bagi ASEAN untuk bersikap senada dalam soal yang sama.

"Sembilan garis putus-putus yang China (China) terapkan tidak punya landasan dalam hukum internasional manapun," kata Presiden Jokowi di Jepang, Maret 2015, seraya menggarisbawahi pentingnya memiliki perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

Jepang juga khawatir atas manuver Beijing di LCS karena bagaimanapun Jepang selama

ini memang dikenal sebagai negara investor terbesar di ASEAN, dengan nilai investasi hingga US\$160 miliar secara keseluruhan pada 2009.

Sembilan garis putus-putus atau nine-dashed line ialah kawasan yang diklaim China di peta Laut China Selatan, yang mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut. Hal tersebut praktis bersinggungan dengan klaim Vietnam, Filipina, Malaysia dan negara ASEAN lainnya.

Di kawasan LCS, terdapat Kepulauan Natuna yang memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik. Hal ini merujuk pada salah satu ladang gas yang terletak 225 kilometer (km) sebelah utara Natuna. Sekali lagi, di sini tersimpan cadangan gas alam dengan volume sebesar 222 triliun kaki kubik (TCT). Selain itu, gas hidrokarbon yang bisa ditambah mencapai 46 TCT. Angka itu tentu saja belum termasuk cadangan gas alam yang terdapat di bagian barat Natuna yang dikelola juragan minyak raksasa kelas dunia. Bukan hanya berjaya di sektor gas alam, Natuna juga diselimuti minyak bumi. Sumur-sumur off shore yang berada di bagian timur Natuna itu dikabarkan terus memancarkan minyaknya.

Oleh sebab itu, pernyataan Jokowi soal LCS harus dilihat dalam konteks kepentingan Indonesia sendiri, yang tak ingin China menggunakan cara-cara militer untuk menghegemoni atau menguasai kawasan itu karena pasti menyeret AS masuk ke kawasan dan menyulut instabilitas. Tentu dapat dimengerti kalau Presiden Jokowi pun menyambut rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengadakan perubahan besar dalam arah strategis, yang berfokus pada pertahanan keutuhan wilayah serta keamanan maritim Indonesia. Kebijakan baru ini mengindikasikan bahwa Jakarta akan menolak klaim China atas Kepulauan Natuna di Indonesia dan lingkungannya yang kaya dengan gas dan minyak bumi.

Tampaknya, negosiasi dengan cara-cara damai ala Asia harus ditonjolkan untuk meredam konflik potensial di LCS agar tak menjadi konflik terbuka. Indonesia dan ASEAN, setidaknya, bisa memainkan peran krusial di dalamnya.

Makna lainnya adalah Jokowi meneguhkan pentingnya tata cara berperilaku (Code of Conduct) di LCS dan juga dialog antara China, Jepang, dan ASEAN. Indonesia mendorong agar hal ini diterjemahkan menjadi proyek-proyek kerja sama konkret ala Asia dan membangunnya dalam semangat perdamaian. Tidak adanya gunanya konflik bersenjata, sebab pembangunan ekonomi yang damai, lebih menjamin stabilitas, ketentraman dan martabat negara-negara Asia, bukan sebaliknya.

Konflik LCS Ganjalan Abad Asia?

Terkait konflik di Laur China Selatan, para pemimpin ASEAN hendaknya menyadari sepenuhnya bahwa strategi perdamaian dan stabilitas Asia harus selamanya ditentukan oleh negara-bangsa Asia, bukan melalui persaingan China-AS yang mengarah pada blok aliansi yang merawankan dan merentankan ketahanan regional secara menyeluruh. Perspektif strategi ASEAN seyogianya selalu dibentuk mengikuti dinamika keseimbangan berbagai kekuatan di dalam dan luar kawasan Asia.

Mengenai sengketa LCS antara China dan Filipina, para pemimpin China mengungkapkan, Beijing berpegang teguh untuk menyelesaikannya melalui perundingan.

“Sikap itu kami pegang teguh dengan mempertimbangkan kepentingan besar hubungan China-Filipina, perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara, dan menjalankan pendekatan konsisten China dalam menangani isu semacam ini,” ungkap diplomat China Liu Hongyang, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta.16

Apalagi, menurut Liu, penyelesaian melalui perundingan bilateral merupakan konsensus yang secara nyata tercantum, baik dalam pernyataan bersama China dan Filipina maupun dalam “Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DoC)” yang ditandatangani oleh China dan negara-negara ASEAN. Tentu saja ASEAN berharap konsistensi Beijing untuk mengedepankan perundingan sesuai Code of Conduct (Kode Perilaku) yang disepakati bersama, bukan moncong senjata.

Bagaimanapun, negara-negara Asia harus menyadari bahwa inti Abad Asia adalah tatkala Asianisasi mampu menghadirkan kekuatan kerja sama intra-Asia memperkuat globalisasi abad KE-21. Tatanan dunia baru Abad Asia ini dirumuskan dalam berbagai faktor oleh berbagai negara. Mulai dari pertumbuhan regional yang dinamis, kehadiran kelas menengah di kawasan, demokratisasi secara bertahap, regionalisme terbuka, percaya diri, hingga peluang luas dalam perdagangan jasa, dan akan mendorong perubahan dalam “kebijakan satu Tiongkok” banyak negara Asia. Bagaimanapun, sejak lama kita tidak percaya pada kekuatan hegemoni kawasan, militer, maupun ekonomi, dan hal itu menjadi dasar pemikiran Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa era Presiden SBY tentang keseimbangan dinamis dalam reposisi kekuatan-kekuatan negara besar di kawasan. Sejak krisis keuangan Asia 1997, diyakini Abad Asia menjadi mimpi bersama, menjadikan ketahanan regional paling solid di tengah ketimpangan dominasi sistem internasional di bidang politik, militer, ekonomi, dan keuangan optimisme yang sehat mendukung ketahanan Asia.

Dalam kaitan ini, bagi ASEAN, sengketa LCS jelas menimbulkan dampak tak menguntungkan bila tak dikelola dengan baik. Sengketa ini bisa saja mendorong terulangnya perpecahan ASEAN seperti di Phnom Penh November 2012, dimana pernyataan bersama ASEAN mengenai LCS tak disepakati bersama. Dalam hal ini, keutuhan ASEAN digoyang tekanan eksternal yang kuat. Padahal, sentralitas ASEAN yang diperjuangkan bersama di berbagai forum akan ternoda bila tak didukung keutuhan ASEAN yang bulat. Seperti diketahui, Taiwan dan beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia mengajukan klaim memiliki kedaulatan atas bagian tertentu dari LCS. ASEAN telah berusaha lebih dari satu dekade memperoleh kesepakatan China melahirkan Kode Perilaku (Code of Conduct) yang mengikat para pihak dalam melakukan kegiatannya di LCS. Deklarasi Perilaku yang berisi kemauan politik dari tiap pihak mempersiapkan mulainya perundingan mengenai Kode Perilaku (Code of Conduct) yang telah disepakati bersama pada 2002.

Bagi ASEAN, sengketa LCS memiliki dua komponen. Pertama, komponen kedaulatan: berbagai negara mengajukan klaim yang tumpang tindih. Masalahnya kompleks karena ada dua kubu yang menggunakan dasar argumen yang bertolak belakang. China dan Taiwan menggunakan argumen sejarah dalam memperjuangkan tuntutannya. Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia menggunakan argumen zona ekonomi eksklusif sesuai dengan hukum laut internasional. Pemecahan masalah ini akan lama karena tiap argumen memiliki celah-celah kelemahannya sehingga penyelesaian tuntasnya bisa mencakup antargenerasi.

Namun demikian, bila tiap pihak berhasil menciptakan suasana batiniah yang nyaman, di tengah absennya penyelesaian masalah kedaulatan, proyek pengembangan bersama dapat dimulai dengan membawa manfaat bersama atas kekayaan alam yang dikandungnya. Komponen kedua menyangkut perdamaian dan stabilitas di LCS yang dapat memengaruhi stabilitas di Asia Tenggara dan pada gilirannya menentukan laju pembangunan di ASEAN. Tindakan ekstra asertif dan provokatif anggota ASEAN akan memancing tindakan balasan yang dapat memicu konflik

bersenjata sehingga menjauhkan pemecahan sengketa dengan cara damai.

Hal ini akan menimbulkan instabilitas kawasan yang akan mencemaskan investor, mengganggu lalu lintas perdagangan, dan dengan sendirinya akan memengaruhi laju investasi ke ASEAN.

Oleh sebab itu, meminjam perspektif Makarim Wibisono dan Rene L Pattiradjawane, hubungan Indonesia, ASEAN dan China harus dilihat tidak terbatas hanya pada masalah Sengketa LCS. Sebaliknya, Asia Tenggara mengharapkan keteladanan dari China, negara terbesar di Asia.

Besar harapan, ketegangan di kepulauan Spratly aman terkendali. Andaikata pertikaian tidak mampu dielakkan, sebaiknya para negara yang terlibat menggunakan ICJ (International Court of Justice) sebagai mediatornya demi mengelakkan hal-hal yang merugikan baik secara politik, militer maupun ekonomi di antara ASEAN maupun China sebagai kuasa baru di Asia.

Benua Asia telah melahirkan agama-agama dan peradaban unggul dunia di masa lalu. Prediksi kini mengarah pada kesamaan pandangan bahwa pusat gravitasi ekonomi internasional akan bergeser ke Asia. Sudah sewajarnya Asia juga berkontribusi mendorong kelahiran norma etika dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, kelahiran Kode Perilaku (Code of Conduct) di LCS merupakan contoh awal dari kemuliaan bangsa-bangsa di Asia. Dengan cara demikian, meminjam perspektif Soedjatmoko, keamanan dan pembangunan sosial-ekonomi, budaya dan perdamaian yang diharapkan dan didambakan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa di Asia, bisa berkelanjutan, demi mewujudkan martabat manusia.

Bibliografi

- Andre H. Pareira, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Carlyle A Thayer, *Southeast Asian Affairs* (Singapura: ISEAS, 2011).
- Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations* (New York: Knopf, 1948), terj.
- Politik Antar Bangsa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Herdi Sahrasad, "Sinyal Jokowi ke RRC soal Laut China Selatan?," *Inilahkoran*, Kamis, 26 Maret 2015.
- John Baylis & Smith Steve (eds), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition (Oxford University Press, 2001).
- Liu Hongyang, "Tiongkok, Kekuatan Teguh Pertahankan Perdamaian dan Kestabilan", *Opini, Kompas*, 23/04/2014.
- Makarim Wibisono, "Laut China Selatan dan Tantangan ASEAN," *Kompas*, opini, Kamis, 11 Juli 2013.
- R. Jackson & G. Sorensen, *Introduction to International Relations* (Oxford: OxfordUniversity Press, 1999).
- Rene L Pattiradjawane, "Asianisasi Menuju Tata Dunia Baru," *Opini, Kompas*, 13/04/2014.
- Richard L. Armitage, "The US and Asia: A Sort of Homecoming", *jurnal Strategic Review*, April-June 2012.
- Robert Beckman, *Issues in Human Security in East Asia* (Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies and Institute of Southeast Asian Studies, 2011)